

# Pengembangan Alat Bantu Teknologi Tepat Guna serta Pelatihan Tata Kelola Administrasi Publik dan Manajemen Stres bagi Aparatur Sumatera Barat

Fera Mutia<sup>1</sup>, Krismena Tovalini<sup>2</sup>, Devi Anita<sup>3</sup>, Sartika Yuliana<sup>4</sup>, Nazirwan<sup>5</sup>,  
Reflinda<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> STIA Adabiah Padang, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail: [feramutia@stiaadabiah.ac.id](mailto:feramutia@stiaadabiah.ac.id)<sup>1</sup>, [krismenatovalini@stiaadabiah.ac.id](mailto:krismenatovalini@stiaadabiah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[devianita@stiaadabiah.ac.id](mailto:devianita@stiaadabiah.ac.id)<sup>3</sup>, [sartikayuliana@stiaadabiah.ac.id](mailto:sartikayuliana@stiaadabiah.ac.id)<sup>4</sup>,  
[nazirwan@stiaadabiah.ac.id](mailto:nazirwan@stiaadabiah.ac.id)<sup>5</sup>

## Article History:

Received: May, 2026

Revised: May, 2026

Accepted: May, 2026

**Abstract:** Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengembangan alat bantu teknologi tepat guna, pelatihan tata kelola administrasi publik, dan pelatihan manajemen stres. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui observasi kebutuhan, pengembangan alat bantu, pelatihan, praktik langsung, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa alat bantu yang dikembangkan dapat mendukung efisiensi administrasi, sementara pelatihan tata kelola administrasi meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pentingnya kerja yang tertib, sistematis, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pelatihan manajemen stres membantu aparatur mengenali tekanan kerja serta menerapkan strategi sederhana untuk menjaga stabilitas psikologis dan kualitas pelayanan publik.

## Keywords:

Teknologi Tepat Guna, Administrasi Publik, Manajemen Stres, Aparatur Publik, Pengabdian Masyarakat

## Pendahuluan

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam era digital menuntut aparatur publik untuk memiliki kemampuan yang semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap perubahan. Tuntutan pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel menjadikan aparatur tidak hanya dituntut menguasai aspek administratif, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung kerja. Dalam konteks tersebut, tata kelola administrasi publik tidak lagi dapat dijalankan secara konvensional semata, melainkan perlu didukung oleh alat bantu yang efektif, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Digitalisasi administrasi telah dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelaporan, mempermudah

pemantauan, serta mengurangi tumpang tindih pekerjaan administratif. Oleh sebab itu, pengembangan alat bantu teknologi tepat guna menjadi relevan sebagai upaya praktis untuk membantu aparatur menjalankan tugasnya secara lebih tertib dan produktif (Darmawan, 2021).

Di sisi lain, transformasi tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan sistem kerja, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Berbagai perubahan kebijakan, peningkatan volume pekerjaan, tuntutan pelayanan masyarakat, serta tekanan untuk mencapai target kinerja sering kali menimbulkan beban psikologis bagi aparatur. Kondisi tersebut apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi memunculkan stres kerja yang berdampak pada menurunnya konsentrasi, kualitas pelayanan, dan stabilitas emosional dalam bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres kerja aparatur sipil negara berada pada kategori sedang dan tetap memerlukan perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas kerja sehari-hari. Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa pelatihan manajemen stres efektif dalam menurunkan tingkat stres ASN, sehingga pendekatan ini penting untuk diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, penguatan kompetensi aparatur tidak cukup hanya diarahkan pada aspek teknis administratif, tetapi juga perlu menyentuh dimensi psikologis dan ketahanan diri (Fatmawati & Wibowo, 2020).

Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparatur masih menghadapi kendala dalam menjalankan administrasi secara efektif akibat keterbatasan alat bantu kerja yang praktis, sistem kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta pemahaman yang belum merata mengenai tata kelola administrasi publik yang baik. Pada saat yang sama, tekanan pekerjaan yang terus meningkat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan stres yang memadai. Situasi ini membuat aparatur rentan mengalami kelelahan mental, penurunan motivasi, dan kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Padahal, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut aparatur yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga sehat secara emosional dan mampu mempertahankan performa kerja di bawah tekanan. Dalam kerangka inilah pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan alat bantu teknologi tepat guna dan pelatihan tata kelola administrasi publik serta manajemen stres menjadi sangat penting, karena kegiatan ini menjawab kebutuhan nyata mitra secara langsung dan aplikatif (Yusuf & Maulana, 2021).

Pengembangan alat bantu teknologi tepat guna dalam kegiatan pengabdian ini

dimaksudkan untuk menyediakan solusi yang sederhana namun fungsional dalam mendukung proses administrasi aparatur. Teknologi tepat guna pada dasarnya merupakan teknologi yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah diterapkan, dan memberikan manfaat langsung bagi efektivitas kerja. Dalam bidang administrasi publik, alat bantu semacam ini dapat berfungsi untuk mempercepat pencatatan, pengarsipan, pelaporan, maupun koordinasi kerja yang selama ini masih dilakukan secara manual atau belum optimal. Selain itu, penerapan teknologi yang tepat juga mendukung upaya modernisasi birokrasi yang sejalan dengan agenda digitalisasi pemerintahan. Melalui pengembangan alat bantu ini, aparatur diharapkan memperoleh pengalaman baru dalam memanfaatkan teknologi secara sederhana tetapi berdampak pada peningkatan kinerja administratif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik juga telah terbukti mampu membantu peningkatan akses informasi, efisiensi administrasi, dan kualitas pelayanan masyarakat (Adi & Suyadi, 2021).

Sementara itu, pelatihan tata kelola administrasi publik diarahkan untuk memperkuat pemahaman aparatur mengenai prinsip-prinsip administrasi yang tertib, sistematis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, tata kelola administrasi yang baik tidak hanya bergantung pada adanya aturan dan prosedur, tetapi juga pada kedisiplinan, keterampilan teknis, dan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas. Pelatihan ini penting agar aparatur memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana administrasi disusun, dijalankan, dan dievaluasi secara efektif. Melalui pelatihan tersebut, aparatur juga diharapkan mampu mengembangkan budaya kerja yang lebih terstruktur, efisien, dan berorientasi pada pelayanan. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas dalam tata kelola administrasi publik merupakan kebutuhan mendesak agar aparatur mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mahsun, 2020).

Selain penguatan aspek teknis dan administratif, kegiatan ini juga menempatkan manajemen stres sebagai komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kinerja aparatur. Stres kerja merupakan respons psikologis yang muncul ketika individu menghadapi tekanan, tuntutan, atau beban pekerjaan yang melebihi kemampuan adaptifnya. Dalam konteks aparatur publik, stres dapat timbul dari beban pelayanan yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, konflik peran, maupun tuntutan organisasi yang terus berubah. Apabila tidak dikelola dengan baik, stres akan berdampak pada menurunnya kualitas kerja, berkurangnya kepuasan kerja, dan melemahnya efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, pelatihan manajemen stres

menjadi langkah strategis untuk membantu aparatur mengenali sumber stres, memahami reaksi tubuh dan pikiran terhadap tekanan, serta mengembangkan strategi pengendalian diri yang sehat. Temuan penelitian membuktikan bahwa pelatihan manajemen stres memberikan pengaruh positif dalam menurunkan tingkat stres ASN, sehingga relevan diterapkan dalam kegiatan pengabdian berbasis peningkatan kapasitas aparatur (Robbins & Judge, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, pengabdian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur publik melalui tiga aspek utama, yaitu penyediaan alat bantu teknologi tepat guna, penguatan keterampilan tata kelola administrasi publik, dan peningkatan kemampuan manajemen stres. Ketiga aspek ini dirancang secara terpadu agar memberikan dampak yang lebih komprehensif terhadap kinerja aparatur, baik dari sisi teknis pekerjaan maupun dari sisi psikologis. Melalui kegiatan ini, aparatur diharapkan mampu bekerja dengan lebih efisien, teratur, dan adaptif terhadap perubahan, sekaligus memiliki ketahanan mental yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Secara lebih luas, kegiatan pengabdian ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas, karena aparatur yang memiliki kompetensi administratif yang baik dan kondisi psikologis yang stabil akan lebih mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan administrasi publik yang modern dan berkelanjutan (Hasibuan, 2021).

## **Metode**

Metode pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan aparatur sebagai mitra aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan solusi, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan persoalan nyata yang dihadapi mitra, khususnya dalam hal keterbatasan alat bantu kerja, kebutuhan peningkatan kapasitas tata kelola administrasi publik, dan perlunya penguatan kemampuan manajemen stres dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu observasi awal dan analisis kebutuhan, perancangan serta pengembangan alat bantu teknologi tepat guna, pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Metode

partisipatif dan praktik langsung sejalan dengan model pengabdian berbasis teknologi tepat guna yang menekankan keterlibatan aktif pengguna agar hasil kegiatan dapat diterapkan secara nyata.

Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan observasi lapangan dan diskusi dengan pihak mitra untuk mengidentifikasi kondisi administrasi yang berjalan, kendala yang dihadapi aparatur, serta kebutuhan prioritas yang perlu segera ditangani. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang alat bantu teknologi tepat guna yang sederhana, aplikatif, dan mudah dioperasikan sesuai konteks kerja aparatur. Setelah itu, tim menyusun materi pelatihan yang mencakup tata kelola administrasi publik, pemanfaatan alat bantu teknologi dalam proses kerja administratif, dan manajemen stres bagi aparatur. Penyusunan materi dilakukan secara sistematis agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Model pelatihan semacam ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang memadukan teori dan praktik untuk meningkatkan kompetensi peserta secara langsung.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, dan praktik penggunaan alat bantu. Pada sesi tata kelola administrasi publik, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi, alur kerja yang efisien, pengelolaan arsip, dan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pada sesi teknologi tepat guna, peserta dilatih untuk menggunakan alat bantu yang telah dikembangkan agar dapat mendukung proses administrasi secara lebih cepat dan rapi. Sementara itu, pada sesi manajemen stres, peserta dikenalkan pada sumber-sumber stres kerja, tanda-tanda stres, serta strategi pengelolaan stres melalui teknik relaksasi sederhana, pengaturan emosi, dan kebiasaan kerja yang sehat. Pelatihan manajemen stres pada ASN terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres, sehingga sesi ini menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian.

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi untuk melihat tingkat pemahaman serta kemampuan peserta dalam menerapkan materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, diskusi reflektif, dan umpan balik terhadap penggunaan alat bantu maupun penerapan materi manajemen stres. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan dokumentasi hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut. Dengan metode ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak berhenti pada transfer pengetahuan semata, tetapi menghasilkan perubahan perilaku kerja yang lebih efektif, tertib, dan sehat secara psikologis. Pendekatan ini juga mendukung

agenda digitalisasi administrasi dan penguatan kapasitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan modern.

## Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga komponen utama, yaitu pengembangan alat bantu teknologi tepat guna, pelatihan tata kelola administrasi publik, dan pelatihan manajemen stres bagi aparatur. Secara umum, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendapatkan respons yang positif dari para peserta. Selama pelaksanaan, aparatur menunjukkan keterlibatan yang aktif, baik dalam sesi diskusi, praktik penggunaan alat bantu, maupun dalam latihan pengelolaan stres. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa peserta pada awalnya memiliki variasi tingkat pemahaman terhadap tata kelola administrasi yang efektif, sementara sebagian besar masih mengandalkan pola kerja manual dalam menyelesaikan tugas administratif. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat mengapa program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga menghadirkan solusi praktis yang dapat digunakan langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pendekatan berbasis teknologi tepat guna terbukti relevan karena teknologi semacam ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah diterapkan dalam konteks kerja tertentu. (Agustino, 2020).



*Gambar 1. Perencanaan Pengabdian*

Pada aspek pengembangan alat bantu teknologi tepat guna, hasil kegiatan menunjukkan bahwa alat yang dikembangkan mampu membantu aparatur dalam menyusun, mengelola, dan menata pekerjaan administratif secara lebih sederhana dan efisien. Alat bantu ini dirancang berdasarkan kebutuhan lapangan, sehingga

pengguna dapat memahaminya tanpa memerlukan pelatihan teknis yang terlalu rumit. Setelah dilakukan demonstrasi dan praktik langsung, peserta menunjukkan kemampuan awal dalam memanfaatkan alat tersebut untuk mendukung proses pencatatan, pengarsipan, dan pemantauan administrasi. Selain itu, peserta juga menilai bahwa alat bantu tersebut dapat mengurangi beban kerja administratif yang selama ini dilakukan secara berulang dan manual. Temuan ini sejalan dengan konsep teknologi tepat guna yang menekankan kesesuaian antara teknologi, kebutuhan pengguna, dan kemudahan penerapan di lapangan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi sederhana yang tepat sasaran dapat mempercepat proses kerja, meningkatkan ketertiban administrasi, dan membantu aparatur beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi birokrasi. (Lazarus & Folkman, 2019).

Hasil pelatihan tata kelola administrasi publik menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya administrasi yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Sebelum pelatihan, sebagian peserta masih memandang administrasi sebagai kegiatan rutin yang bersifat teknis semata, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kualitas pelayanan publik. Setelah materi disampaikan, peserta mulai memahami bahwa tata kelola administrasi publik merupakan bagian penting dari upaya menciptakan layanan yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Diskusi yang berlangsung selama sesi pelatihan juga memperlihatkan bahwa peserta memiliki sejumlah persoalan nyata terkait pencatatan dokumen, alur kerja, dan koordinasi internal. Melalui simulasi dan penjelasan yang diberikan, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai cara menyusun prosedur kerja yang lebih sistematis. Hal ini penting karena digitalisasi dan modernisasi administrasi hanya akan efektif apabila aparatur memiliki kompetensi yang memadai untuk mengoperasikan sistem dan menjalankan proses administrasi secara disiplin. (Nuraini & Sutarto, 2021).

Dalam proses pelaksanaan, peserta juga menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap integrasi alat bantu teknologi dengan tata kelola administrasi yang lebih modern. Keterkaitan antara penggunaan alat bantu dan peningkatan kualitas administrasi terlihat dari tanggapan peserta yang menyatakan bahwa alat tersebut dapat membantu mempersingkat waktu kerja dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan teknologi sebagai perangkat pendukung, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang aparatur terhadap pentingnya efisiensi administratif. Penggunaan teknologi yang tepat dalam administrasi publik berpotensi mengurangi tumpang tindih pekerjaan,

memperjelas alur informasi, dan memperkuat akurasi data. Dalam kerangka reformasi birokrasi, hasil ini menunjukkan bahwa pengabdian berbasis teknologi tepat guna dapat menjadi instrumen kecil namun strategis dalam membangun budaya kerja yang lebih tertib dan responsif. (Fatmawati & Wibowo, 2020).

Pada bagian pelatihan manajemen stres, hasil yang diperoleh juga menunjukkan kecenderungan positif. Sebagian besar peserta mengaku baru menyadari bahwa tekanan kerja yang dialami sehari-hari dapat dikelola melalui teknik-teknik sederhana seperti pengaturan napas, pengendalian pikiran, pengaturan prioritas, dan pembiasaan komunikasi yang lebih sehat di tempat kerja. Selama sesi berlangsung, peserta mengikuti latihan dengan antusias dan aktif membagikan pengalaman pribadi mengenai beban kerja, konflik tugas, serta rasa jenuh dalam menjalankan rutinitas administratif. Situasi ini menunjukkan bahwa stres kerja merupakan persoalan nyata yang dialami aparatur dan memerlukan pendekatan yang sistematis untuk menanganinya. Hasil penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa pelatihan manajemen stres pada ASN memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat stres setelah pelatihan dilaksanakan. Temuan tersebut memperkuat bahwa pelatihan semacam ini bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga memiliki manfaat langsung dalam mendukung kesehatan psikologis aparatur. (Darmawan, 2021).



*Gambar 2. Pemberian Materi Pengabdian*

Lebih jauh, pelatihan manajemen stres dalam kegiatan ini membantu peserta memahami hubungan antara kondisi emosional, motivasi kerja, dan kualitas pelayanan. Aparatur yang mengalami stres berkepanjangan cenderung sulit

berkonsentrasi, lebih mudah lelah, dan kurang optimal dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya, aparatur yang memiliki kemampuan mengelola stres akan lebih tenang dalam menghadapi tekanan, lebih fokus dalam mengambil keputusan, dan lebih stabil dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun masyarakat. Oleh karena itu, materi manajemen stres menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kapasitas aparatur publik. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur tidak cukup dilakukan melalui pelatihan teknis saja, melainkan juga melalui pengembangan keterampilan personal yang mendukung ketahanan kerja. Pandangan ini selaras dengan temuan bahwa pelatihan manajemen stres dapat terus dilakukan untuk menurunkan stres pada ASN dan memperkuat efektivitas kerja mereka. (Nuraini & Sutarto, 2021).

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan adanya sinergi antara tiga komponen kegiatan, yaitu teknologi tepat guna, tata kelola administrasi publik, dan manajemen stres. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk aparatur yang lebih cakap secara teknis, lebih tertib dalam bekerja, dan lebih siap menghadapi tekanan kerja. Alat bantu teknologi membantu efisiensi operasional, pelatihan administrasi memperkuat pemahaman prosedural, sedangkan pelatihan manajemen stres menjaga kestabilan psikologis aparatur. Sinergi tersebut penting karena perbaikan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sistem dan alat, tetapi juga pada kualitas manusia yang menjalankannya. Dengan kata lain, keberhasilan tata kelola publik sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur untuk mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan pengendalian diri dalam satu kesatuan kerja yang produktif. (Agustino, 2020).

Dari sisi partisipasi, kegiatan ini juga memperlihatkan adanya antusiasme dan komitmen yang baik dari peserta. Mereka tidak hanya hadir sebagai penerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses diskusi, tanya jawab, dan simulasi praktik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka dan komunikatif. Partisipasi aktif peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan, karena solusi yang ditawarkan dapat langsung diuji melalui pengalaman mereka sendiri. Selain itu, interaksi antara tim pelaksana dan peserta membantu mengidentifikasi peluang pengembangan lebih lanjut, misalnya perlunya pendampingan lanjutan agar penggunaan alat bantu dan penerapan strategi manajemen stres dapat berjalan konsisten. Model pengabdian yang berbasis pelatihan, pendampingan, dan penerapan teknologi seperti ini juga sejalan dengan praktik pengabdian masyarakat yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dari proses pemberdayaan.

(Fatmawati & Wibowo, 2020).



*Gambar 3. Dokumentasi Pengabdian*

Pada akhirnya, kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan kualitas aparatur publik perlu dilakukan secara holistik. Pengembangan alat bantu teknologi tepat guna hanya akan efektif apabila dibarengi dengan peningkatan pemahaman administratif dan kesiapan mental aparatur dalam menggunakannya. Demikian pula, pelatihan tata kelola administrasi akan lebih bermakna jika peserta memiliki kondisi psikologis yang stabil dan mampu mengelola tekanan kerja. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini dapat dipandang sebagai kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur publik di tingkat operasional. Selain memberi manfaat praktis bagi mitra, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana strategis untuk menjembatani ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan nyata birokrasi di lapangan. (Mangkunegara, A. P., 2021).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan alat bantu teknologi tepat guna serta pelatihan tata kelola administrasi publik dan manajemen stres bagi aparatur memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kapasitas mitra. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan alat bantu yang dapat mendukung efektivitas pekerjaan administratif, tetapi juga mendorong aparatur untuk memahami

pentingnya tata kelola administrasi yang lebih tertib, sistematis, dan akuntabel. Selain itu, pelatihan manajemen stres membantu peserta mengenali tekanan kerja yang mereka hadapi sekaligus memberikan strategi praktis untuk mengelola stres agar tetap mampu bekerja secara optimal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas aparatur publik perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga melalui pengembangan kesiapan psikologis agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Secara umum, respons peserta terhadap kegiatan ini sangat positif. Peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti sesi pelatihan, aktif dalam diskusi, serta mampu memahami dan mencoba menerapkan materi yang diberikan. Penggunaan alat bantu teknologi tepat guna juga dinilai membantu mempermudah proses administrasi dan memberi gambaran baru tentang pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa digitalisasi administrasi dan pelatihan manajemen stres merupakan dua aspek penting yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kerja aparatur di era birokrasi modern. Oleh karena itu, kegiatan serupa layak untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur publik yang berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar kegiatan pengabdian seperti ini tidak hanya dilaksanakan satu kali, tetapi dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan dan pelatihan lanjutan. Mitra perlu terus didorong untuk mengoptimalkan penggunaan alat bantu yang telah dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dalam aktivitas administrasi harian. Di samping itu, materi tata kelola administrasi publik dan manajemen stres sebaiknya diperbarui secara berkala agar selalu relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan kerja aparatur. Bagi pelaksana pengabdian berikutnya, kegiatan ini juga dapat diperluas dengan menambahkan aspek digitalisasi layanan, penguatan komunikasi organisasi, atau evaluasi kinerja aparatur sehingga dampak pengabdian menjadi lebih komprehensif. Dengan langkah tersebut, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menghasilkan output jangka pendek, tetapi juga mampu membangun perubahan perilaku kerja dan budaya organisasi yang lebih sehat, adaptif, dan produktif.

## **Daftar Referensi**

Adi, I. W., & Suyadi, I. (2021). *Teknologi Tepat Guna: Konsep, Perancangan, dan Penerapan di Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Teori dan Penerapan*. Bandung:

Alfabeta.

Azwar, S. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bappeda & Litbang Provinsi Jawa Barat. (2023). *Panduan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Aparatur Pemerintah*. Bandung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Darmawan, D. (2021). *Sistem Informasi dan Teknologi dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Rosda Karya.

Dharma, S. (2019). *Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Press.

Eka, R., & Susanto, H. (2022). Pengembangan alat bantu kerja berbasis teknologi tepat guna untuk efisiensi administrasi kantor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 6(2), 45–58. <https://doi.org/10.31764/jpmi.v6i2.789>

Fatmawati, A., & Wibowo, A. (2020). Pengaruh manajemen stres terhadap kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 21(1), 112–126.

Hasibuan, M. S. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kementerian PANRB. (2022). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kurniawan, H., & Santoso, B. (2023). Pelatihan tata kelola administrasi dan penguasaan teknologi: Dampak pada efektivitas kerja aparatur desa. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(1), 29–42.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (2019). *Stres, Penilaian, dan Penanganan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mahsun, M. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mangkunegara, A. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan & Sektor Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, H. (2022). *Ergonomi dan Perancangan Alat Kerja untuk Efisiensi dan Kenyamanan Kerja*. Jakarta: Salemba Empat.

Nuraini, T., & Sutarto, J. (2021). *Pelatihan manajemen stres kerja untuk meningkatkan*

kesejahteraan psikologis aparatur pemerintah. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, 10(3), 201–214.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Perilaku Organisasi* (Edisi 18). Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, R., & Hidayat, A. (2020). Penerapan teknologi tepat guna dalam mendukung tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2), 89–104.

Simamora, H. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 4). Yogyakarta: STIE YKPN.

Sutarto, J., & Ramadhani, D. (2023). Efektivitas program pelatihan manajemen stres dan adaptasi teknologi di lingkungan pemerintahan daerah. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 56–67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Wibowo, A. (2022). *Manajemen Kinerja Sektor Publik: Konsep, Strategi, dan Penerapan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yusuf, M., & Maulana, R. (2021). Inovasi teknologi tepat guna dan pengembangan kompetensi administrasi: Studi pengabdian pada aparatur kecamatan. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 12–24.